

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG (STUDI KASUS DINAS PENGELOLAAN ASET DAERAH KABUPATEN SOPPENG) TAHUN 2011-2015

Masyadi

Dosen STIE Lamappoleonro Soppeng
Jurusan Manajemen, STIE Lamappoleonro Soppeng
e-mail : edhythz@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Soppeng berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Soppeng seperti ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat, rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, Kurangnya usaha dan Penerimaan Daerah dalam pengelolaan dan menggali Sumber-sumber pendapatan yang ada, Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Untuk itu penting adanya pengukuran kinerja keuangan terhadap public agar dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Analisis kinerja keuangan pada Dinas Pengelolaan Aset Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng salah satu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan PAD Kabupaten Soppeng dalam bidang keuangan untuk kurung waktu tertentu. Dengan adanya analisis pengukuran kinerja keuangan, Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Efektif, karena rata-rata nilai rasio Efektivitas PAD adalah 103,31%, sehingga Rasio Efektivitas PAD > 100%, dari Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah sebesar 53,36%, yang artinya Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berada pada 60%-80%, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng efektifitas.

Kata kunci: Analisis, Kinerja, Keuangan.

ABSTRACT

The Soppeng District Government as the party entrusted with the task of running the government, development and community service must submit its regional financial accountability report to be assessed whether the Soppeng District government has successfully carried out its duties or not. Some of the regional financial problems faced by Soppeng Regency such as the dependence of local governments on subsidies from the central government, the low ability of the regions to explore the potential sources of local revenue, lack of effort and Regional Revenue in managing and exploring existing sources of income, inefficiency of local governments in doing regional shopping. For this reason, it is important to measure the financial performance of the public so that it can be used as an evaluation and restore performance by comparing the work scheme and its implementation. Analysis of financial performance at the Department of Regional Asset Management (PAD) of Soppeng Regency is one of the assessment processes regarding the level of progress of the achievement of the implementation of PAD work / activities in Soppeng District in the financial field for a certain period of time. With the analysis of financial performance measurement, Soppeng District Government Finance seen from the PAD Effectiveness Ratio can be categorized as Effective, because the average PAD Effectiveness ratio is 103.31%, so that the PAD Effectiveness Ratio > 100%, from the Regional Financial Efficiency of Soppeng District Government is amounting to 53.36%, which means that the Regional Financial Efficiency Ratio is at 60% -80%, it can be concluded that the Financial Performance of Soppeng District Government is effective.

Keywords: Analysis, Performance, Finance.

1. PENDAHULUAN

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi

nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya

peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Soppeng antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik

dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding dengan Total Penerimaan Daerah. (3) Kurangnya usaha dan Penerimaan Daerah dalam pengelolaan dan menggali Sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Soppeng, karena itu Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Soppeng berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya penyelewengan-penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintahan pada masa kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat geram dan krisis kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng, untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Soppeng, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Analisis kinerja keuangan pada Dinas Pengelolaan Aset Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan PAD Kabupaten Soppeng dalam bidang keuangan untuk kurung waktu tertentu.

1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Soppeng jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
2. Untuk mengetahui Kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Soppeng jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui Kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Soppeng jika dilihat dari Rasio Kekeragaman.

1.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan pada Dinas PAD Kabupaten Soppeng dengan menerapkan Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Kekeragaman adalah untuk mengetahui kinerja Keuangan Dinas PAD Kabupaten Soppeng ditinjau dari teori Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Kekeragaman untuk Menganalisis Kinerja Keuangan DPAD Kabupaten Soppeng dan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Mamesah (Halim 2008: 18-19) keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal ini Bastian (2001) dalam Moito (2010) menyatakan persektif kedepan dari sistem keuangan daerah adalah mewujudkan sistem perimbangan antara keuangan pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber

keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

2.2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah gambaran tentang neraca / laporan posisi keuangan, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal dari suatu perusahaan yang terjadi pada saat tertentu. Laporan keuangan ini diperlukan oleh investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan dalam rangka mengakomodasikan kepentingan masing-masing. Laporan keuangan biasa dibuat oleh perusahaan pada akhir periode atau pada akhir tahun buku. Laporan keuangan dapat dibuat secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Namun untuk kepentingan pihak eksternal laporan keuangan dibuat secara tahunan.

Laporan keuangan tahunan meliputi : Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan laba ditahan dan Laporan Arus Kas. Dalam laporan keuangan terdapat dua macam informasi penting yang diperoleh para pemegang saham, yaitu bagian dari uraian, yang berupa kata pengantar dari pucuk pimpinan, perusahaan, yang menggambarkan hasil usaha kegiatan perusahaan selama satu periode (satu tahun) yang lalu serta membahas perkembangan-perkembangan baru yang terjadi yang akan mempengaruhi kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang.

Tujuan dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermantap bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.3. Penilaian Kinerja

Penilaian adalah suatu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif sesuatu objek, perkara, atau keadaan. Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam suatu unit angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan.

Kinerja dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi (Bastian,2001:329), sedangkan penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam

arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun proses (Larry D. Stout dalam Bastian, 2001:329). Artinya bahwa setiap kegiatan organisasi merupakan suatu proses yang tercatat dalam misi dan sejalan dengan tujuan organisasi, dimana kegiatan tersebut dikatakan sukses apabila hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Penilaian kinerja merupakan suatu alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (James B. Whittaker dalam Bastian, 2001:121).

2.4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi,1986: 199).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

2.5. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2007: 231).

2.6. Hipotesis

1. Diduga Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD kurang Efektif ?
2. Diduga Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah kurang Efisien ?
3. Diduga Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng jika dilihat dari Rasio Keserasian kurang baik?

3. METODE PENELITIAN

3.1. Operasional

Definisi operasional variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006 : 118). Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas PAD, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah Metode Economic Value Added (EVA) merupakan metode lain yang digunakan dalam menilai kinerja perusahaan yang memfokuskan pada penerapan nilai, dan hanya bisa menilai proses dalam periode 1 tahun. Di Indonesia Economic Value Added (EVA) biasa disebut dengan konsep Nilai Tambah Ekonomi (NITAMI).
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD), menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.
3. Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

3.2. Populasi dan Sampel

1. Populasi
 Populasi adalah kelompok dimana seorang peneliti akan memperoleh hasil penelitian yang dapat disamaratakan (digeneralisasikan). Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.
2. Sampel
 Sampel dari Penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011 dan 2015.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi.

Metode Dokumentasi ini melakukan pengumpulan data dari DPPKAD Kabupaten Soppeng berupa data umum dan data khusus. Data umum berupa :

1. Gambaran umum Kabupaten Soppeng
2. Gambaran umum Dinas PAD Kabupaten Soppeng
3. Dan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2011-2015.

3.4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolok ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah :

1. Rapid Efektivitas PAD
 Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mahsun (2009), adalah :

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
 - b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80% 90%	Cukup Efisien
60% 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

3. Rasio Keserasian
 Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Abdul Halim 2007:236) :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penyajian dan Analisis Data

1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mahsun (2009), adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif

Tabel 2. Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli daerah (PAD) Tahun 2011-2015

Keterangan Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efektifitas
2011	10.551.702.570,00	8.914.222.633,89	84,37%
2012	8.716.704.456,00	6.381.174.841,80	74,69%
2013	6.709.499.464,00	6.876.125.679,32	102,48%
2014	7.704.902.747,00	11.266.106.512,36	145,10%
2015	14.810.965.690,00	16.280.918.440,79	109,92%
Rata-rata			103,31%

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pemkab Soppeng dalam lima tahun terakhir (2011-2015) mengalami kenaikan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2012-2013 sebesar 27,79% (102,48%-74,69%), 2013-2014 sebesar 42,62% (145,10%-102,48%),. Selebihnya mengalami penurunan pada tahun 2011-2012 sebesar 9,68% (84,37%-74,69%), dan tahun 2014-2015 sebesar 38,28% (145,10%-109,92%).

2. Rasio Efisiensi Keuangan daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja

pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2011-2015

Keterangan Tahun	Belanja	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi
2011	8.914.222.633,89	6.341.103.060,00	71,13%
2012	11.266.106.512,36	1.333.081.366,00	11,85%
2013	16.280.918.440,79	10.123.999.999,00	65,87%
2014	17.160.780.983,52	11.490.896.679,00	65,81%
2015	15.879.492.265,47	3.117.796.990,00	52,12%
Rata-rata			53,36%

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio efisiensi Keuangan Daerah Pemkab Soppeng dalam Lima tahun terakhir (2011-2015) mengalami tiga kali kenaikan yaitu pada tahun 2011-2012 sebesar 59,28% (71,13%-11,85%), 2013-2014 sebesar 0,06% (65,87%-65,81%), dan tahun 2014-2015 sebesar 13,69% (65,81%-52,12%). Selebihnya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2012-2013 sebesar 54,02% (65,87%-11,85%).

3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Abdul Halim 2007:236):

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Perhitungan Rasio Keserasian Tahun Anggaran 2011-2015

Keterangan Tahun	Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2011	804.615.000.321,00	731.751.544.269,00	91,19%
2012	797.077.475.755,00	741.451.499.455,00	93,27%
2013	923.821.178.064,00	818.041.431.123,00	88,36%
2014	745.272.227.188,00	822.838.300.472	90,24%
2015	853.598.610.775,00	982.645.994.738	86,99%
Rata-rata			89,99%

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio belanja daerah Pemkab Soppeng dalam Lima tahun terakhir (2011-2015) mengalami dua kali kenaikan yaitu pada tahun 2011-2012 sebesar 2,08% (93,27%-91,19%), Tahun 2013-2014 sebesar 1,88% (90,24%-88,36%),.. Selebihnya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2012-2013 sebesar 4,91% (93,27%-88,36%), dan tahun 2014-2015 sebesar 3,34% (90,24%-86,90%).

4.2. Pembahasan

1. Rasio Efektifitas PAD

Berdasarkan Tabel 2. di atas, dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pemkab Soppeng dalam lima tahun terakhir (2011-2015) mengalami kenaikan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2012-2013 sebesar 27,79% (102,48%-74,69%), 2013-2014 sebesar 42,62% (145,10%-102,48%),.. Selebihnya mengalami penurunan pada tahun 2011-2012 sebesar 9,68% (84,37%-74,69%), dan tahun 2014-2015 sebesar 38,28% (145,10%-109,92%). Dari lima tahun terakhir (2011-2015) Rata- rata Rasio Efektivitas PAD adalah sebesar 103,31%, yang artinya Rasio Efektivitas PAD > 100%, sehingga dapat diketahui bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng Dilihat dari rasio efektifitas PAD efektif.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa rasio efisiensi Keuangan Daerah Pemkab Soppeng dalam Lima tahun terakhir (2011-2015) mengalami tiga kali kenaikan yaitu pada tahun 2011-2012 sebesar 59,28% (71,13%-11,85%), 2013-2014 sebesar 0,06% (65,87%-65,81%), dan tahun 2014-2015 sebesar 13,69% (65,81%-52,12%). Selebihnya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2012-2013 sebesar 54,02% (65,87%-11,85%). Dari lima tahun terakhir (2011-2015) Rata- rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah sebesar 53,36%, yang artinya Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berada pada 60%-80%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng Dilihat dari rasio Efisiensi Keuangan daerah adalah Efisien.

3. Rasio Keserasian

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2011 Rasio Belanja Operasinya sebesar 91,19% mengalami Kenaikan pada tahun 2012 menjadi 93,27%, kemudian turun pada tahun 2013 menjadi 88,36%, dan pada tahun 2014 naik menjadi 90,24%. Namun menurun kembali pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 86,96%, sehingga rata-rata rasionya sebesar

89,99%. Sedangkan pada Rasio Belanja Modal pada tahun 2011 sebesar 9,81% turun menjadi 6,73% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 mengalami Kenaikan kembali menjadi 11,64%, dan turun lagi pada tahun 2014 menjadi 9,76%. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan kembali menjadi 13,10% sehingga rata-rata rasionya sebesar 10,21%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Soppeng kecil atau belum terpenuhi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Efektif, karena rata- rata nilai rasio Efektivitas PAD adalah 103,31%, sehingga Rasio Efektivitas PAD > 100%.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien karena Rata- rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah sebesar 53,36%, yang artinya Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berada pada 60%-80%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng Dilihat dari rasio Efisiensi Keuangan daerah adalah Efisien
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng jika dilihat dari Rasio Keserasian diketahui belum stabil. sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-

rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Soppeng masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal. 2003. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Malang: UMM.
- Ambarwati. 2010. Manajemen Keuangan Lanjutan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andy, Bangsawan. 2008. Penerapan Kinerja Keuangan dengan Metode EVA Pada PT. Kalbe Farma, Tbk. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Suatu Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deanta. 2009. Memahami Pos-Pos dan Angka-Angka Dalam Laporan Keuangan Untuk Orang Awam. Yogyakarta: Gava Media.
- Farah, Margaretha. 2007. Manajemen Keuangan, edisi kedua, cetakan kedua. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gill, O. James dan Moira, Chatton. 2005. Memahami Laporan Keuangan (Memanfaatkan Informasi Keuangan Untuk Mengendalikan Bisnis Anda), cetakan ketiga. Jakarta: PPM.
- Hanafi. 2005. Manajemen Keuangan, edisi pertama. Jakarta: Grasindo.
- Harahap, Sofyan, Syafri. 2007. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, edisi kedua, cetakan keempat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harmono. 2009. Manajemen Keuangan yang Berbasis *Balanced Scorecard* Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis, edisi pertama, cetakan pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan, per 01 September 2007. Jakarta: Salemba Empat.
- Imam Agus Setiyantoro. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Gudang Garam Tbk dengan Menggunakan Metode EVA. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Iramani, R.r. 2005. *Financial Value Added: Suatu Paradigma dalam Pengukuran Kinerja dan Nilai Tambah Perusahaan*. Surabaya: Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Mamduh, Hanafi, M. 2005. Manajemen Keuangan, edisi 2004/2005, cetakan pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Munawir, S. 2007. Analisa Laporan Keuangan, edisi keempat, cetakan kedelapan. Yogyakarta: Liberty.
- Prihadi. 2009. Analisis Rasio Keuangan, edisi kedua, cetakan kedua. Jakarta: PPM.
- Riyanto, Bambang. 2001. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, edisi keempat, cetakan ketujuh. Yogyakarta: BPFE.
- Sartono, Agus. 2001. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, edisi keempat, cetakan pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Stewart dan Sten. 1993. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suad, Husnan dan Pudjiastuti, Enny. 2004. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Yogyakarta: UPP AMP YKPM.
- Syamsuddin, Lukman. 2002. Manajemen Keuangan Perusahaan, edisi terbaru, cetakan ketujuh. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tunggal, Amin, Widjaja. 2001. Memahami Konsep *Economic Value Added (EVA)* Dan *Value Based Management (VBM)*. Jakarta: Harvarindo.
- Utomo, Lisa, Linawati. 1999. *Economic Value Added* sebagai Ukuran Keberhasilan Kinerja Manajemen. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1 (1): 28 – 42.
- Warsono. 2003. Manajemen Keuangan Perusahaan, edisi ketiga, cetakan pertama, jilid satu. Malang: Bayu Media.
- Young, S. David dan O' Byrne, Stephen F. 2001. EVA dan Manajemen Berdasarkan Nilai. Jakarta: Salemba Empat.
- Zarkasyi, M. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance*, Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, cetakan pertama. Bandung: Alfabeta.